



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JUMAIL MAPPILE**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **159818**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.225.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/234 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 20269 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 755.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,4L DAKAR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 30.000.000****D. SURAT BERTAHAGA****Rp. 300.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 112.551**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.310.112.551
III. HUTANG	Rp.	450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.860.112.551

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.